

**ANALISIS KOMPONEN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA  
SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI JAWA TENGAH  
(Pendekatan Model E-M Shift Share Analysis)**

Ropingi

Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis  
Jurusan Sosek Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS)

**Abstract**

*Economy development in Central Java is hardly apart from changes in the provision absorption of workers per economical sector, although it has been forwarded to decrease people's income distribution inequality. Therefore, the economy development should be focused on the efforts to distribute workers to economy sectors based on the relative market to Gross Regional Domestic Product (PDRB).*

*In line with this problem, this research actually has some objectives. The first, to observe the allocation effects in agricultural and non-agricultural sectors in Central Java in the period 1995 – 1999. Secondly, to identify economy sectors at every regencies in Central Java. The required data here is time series data consisting the information about workers adapted from Central Statistics Agency (BPS) Central Java, and also completed by other supporting data. Meanwhile, to observe allocation effect, the writer apply E-M shift Share Analysis approach. Some findings has been achieved in this research, those are agricultural, manufacturing and service sectors which successfully absorb a large number of workers, identification on agricultural sector at several areas which have good fairly competition and the not ones, and also the friction moving of workers allocation from non-agricultural sectors into agricultural sectors.*

**Keywords:** *income inequality, effect of allocation sector, shift share Esteban-Marquillas, growth of territory share*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses transformasi ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya dan politik masyarakat tradisional ke arah struktur ekonomi, ketenagakerjaan, sosial, budaya, dan politik masyarakat modern yang semakin rasional dengan diferensiasi fungsi yang jelas dalam sistem produksi masyarakat (Winoto, 1996). Di samping itu pembangunan juga bisa diartikan sebagai pertumbuhan dan perubahan (Soekartawi, 1996; Suparmoko, M., dan Irawan, 1995). Selama ini pembangunan nasional masih memprioritaskan pada pembangunan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang biasa diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Dengan demikian tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk meningkatkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri (Suparmoko, M. dan Irawan, 1995). Pembangunan ekonomi pada intinya adalah suatu proses meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat ke taraf yang lebih baik/tinggi (Hulu, 1988).

### **Perumusan Masalah**

Kelangkaan tenaga kerja di sektor industri dan jasa ini dapat disebabkan oleh adanya daya serap yang rendah atau karena kelangkaan tenaga kerja yang memenuhi standar yang dibutuhkan oleh sektor industri dan jasa. Keadaan ini akan berdampak pada pola pendapatan masyarakat dan tingkat upah yang diterima para tenaga kerja. Akibat selanjutnya adalah akan terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat yang berada di berbagai sektor perekonomian. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk bisa mendistribusikan tenaga kerja ke dalam sektor-sektor perekonomian sesuai dengan pangsa relatif terhadap PDB atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga ketimpangan pendapatan antar sektor dapat dikurangi atau dapat dihambat lajunya.

Pembangunan yang dilakukan selama ini di Propinsi Jawa Tengah meski diarahkan untuk mengurangi ketimpangan, namun tidak bisa dihindari adanya perubahan dalam hal penyediaan dan penyerapan tenaga kerja per sektor perekonomian. Selama periode tahun 1995 sampai tahun 1999 penyerapan tenaga kerja tiap sektor perekonomian di Propinsi Jawa Tengah mengalami perubahan-perubahan baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Dengan demikian perlu juga diketahui bagaimana efek alokasi tenaga kerja setiap sektor perekonomian di Jawa Tengah selama periode tahun 1995 sampai tahun 1999, dan bagaimana kontribusi tenaga kerja sektor pertanian terhadap jumlah total tenaga kerja serta bagaimana keragaan ataupun pertumbuhan tenaga kerja per sektor di tiap kabupaten di Propinsi Jawa Tengah pada periode tahun tersebut. Untuk mengetahui perkembangan tenaga kerja setiap sektor perekonomian di Propinsi Jawa Tengah selama periode tahun 1995 dan 1999 dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Tiap Sektor Perekonomian di Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1995 dan 1999**

Sektor	Tahun 1995	Tahun 1999	Perkembangan (%)
Pertanian	5.986.592	6.125.028	2.31
Pertambangan, Galian	113.123	119.170	5.35
Industri Pengolahan	1.942.307	2.039.853	5.02
Listrik, Gas, Air Minum	46.435	23.007	-50.45
Bangunan	771.782	720.194	-6.68
Perdagangan	2.448.435	2.582.209	5.46
Komunikasi	524.699	575.019	9.59
Keuangan	67.162	78.454	16.81
Jasa	1.890.549	1.804.144	-4.57

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efek alokasi sektor pertanian dan sektor non pertanian di Propinsi Jawa Tengah.
2. Identifikasi sektor perekonomian di tiap-tiap DATI II di Propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan atau input bagi pembuat kebijakan khususnya yang berkenaan dengan pengembangan dan penyediaan tenaga kerja masing-masing kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, sehingga dapat menopang pembangunan serta keberlanjutan otonomi daerah (OTDA). Dengan adanya informasi awal ini nantinya dalam menentukan sektor mana yang perlu dikembangkan di suatu daerah/kabupaten untuk mengantisipasi penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan tepat guna dan tepat sasaran.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian yang diperlukan selama 4 bulan, dimulai Bulan Juni 2001 sampai Bulan Oktober 2001.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data time series tentang tenaga kerja selama lima tahun terakhir yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, dan data lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

Pengumpulan data ini diawali dengan melakukan studi kepustakaan yang merupakan upaya untuk mencari dan menginventarisasi data yang dianggap ada hubungannya dengan tujuan penelitian ini. Selain itu dalam kegiatan ini berupaya pula untuk mempertimbangkan data mana yang seharusnya diperlukan dan tersedia disesuaikan dengan tujuan dan alat analisis yang ada.

Langkah selanjutnya setelah kegiatan awal ini adalah pengumpulan data yang berupa data sekunder tentang jumlah tenaga kerja per sektor perekonomian tiap kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Data sekunder ini pada umumnya dalam bentuk tabel-tabel yang sudah siap pakai, namun demikian perlu juga dilakukan pengolahan lebih lanjut yang disesuaikan dengan tujuan dan alat analisis, serta untuk memperoleh kelengkapan, keabsahan serta konsistensi data perlu adanya penajaman interpretasi data bersangkutan sehingga data tersebut akan lebih bermakna.

Dengan keterbatasan yang ada maka berbagai kelemahan dari bahan penelitian ini diakui tetap ada dan peneliti yakin kelemahan itu ada, oleh karena itu, bagi semua pihak yang menggunakan hasil penelitian ini baik yang langsung maupun tidak langsung ataupun

instansi terkait yang ada hubungannya dengan tujuan penelitiannya, anggaphlah bahwa hasil penelitian yang berupa informasi ini bukan merupakan proses pemecahan masalah secara konkret atau pasti, akan tetapi hendaknya hasil penelitian ini dianggap sebagai suatu pendekatan untuk menjawab masalah yang dihadapi. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan-keputusan ekonomi yang relevan.

Untuk mengetahui efek alokasi yang terjadi digunakan pendekatan *Analisis Shift Share Esteban-Marquillas (E-M Shift Share)* dengan formulasi sebagai berikut:

$$d_{ij} = E_{ij}r_{..} + E_{ij}(r_i - r_{..}) + \hat{E}_{ij}(r_{ij} - r_i) + (E_{ij} - \hat{E}_{ij})(r_{ij} - r_i) \text{ atau}$$

$$E_{ij}(R_a - 1) + E_{ij}(R_i - R_a) + \hat{E}_{ij}(r_i - R_i) + (E_{ij} - \hat{E}_{ij})(r_i - R_i),$$

di mana:

- $d_{ij}$  : Perubahan tenaga kerja sektor i pada wilayah j.
- $E'_{ij}$  : Tenaga kerja dari sektor i pada wilayah j pada tahun akhir analisis;
- $E_{ij}$  : Tenaga kerja dari sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis;
- $\hat{E}_{ij}$  : "Homothetic Employment" sektor i pada wilayah j  
 $= (E_{.j} \times E_{i.} / E_{..})$
- $(R_a - 1)$  : Persentase perubahan tenaga kerja yang disebabkan komponen pertumbuhan nasional; ( $= r_{..}$ ).
- $(R_i - R_a)$  : Persentase perubahan tenaga kerja yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional;
- $(r_i - R_i)$  : Persentase perubahan tenaga kerja yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah.
- $(r_i - 1)$  : Persentase perubahan tenaga kerja pada sektor i wilayah j ( $= r_{ij}$ ).

$E_{i.} = \sum E_{ij}$  : Tenaga kerja (Regional Jawa Tengah) dari sektor i pada tahun dasar analisis

$E'_{i.} = \sum E'_{ij}$  : Tenaga kerja (Regional Jawa Tengah) dari sektor i pada tahun akhir analisis

$E_{..} = \sum \sum E_{ij}$  : Tenaga kerja (Regional Jawa Tengah) pada tahun dasar analisis.

$E'_{..} = \sum \sum E'_{ij}$  : Tenaga kerja (Regional Jawa Tengah) pada tahun akhir analisis.

$$r_i = E'_{ij} / E_{ij}$$

$$R_i = E'_{i.} / E_{i.}$$

$$R_a = E'_{..} / E_{..}$$

Efek Alokasi ( $a_{ij}$ ) sektor i pada wilayah j ditentukan dengan:

$$a_{ij} = (r_{ij} - r_i)(E_{ij} - \hat{E}_{ij}) \text{ atau } (r_i - R_i)(E_{ij} - \hat{E}_{ij})$$

Dari  $a_{ij}$  akan diperoleh:

1. Spesialisasi sektor i pada wilayah j dengan simbol ( $E_{ij} - \hat{E}_{ij}$ )
2. Keuntungan kompetitif/daya saing wilayah yaitu besaran yang ditunjukkan oleh nilai dari  $\hat{E}_{ij}(r_{ij} - r_i)$  atau  $\hat{E}_{ij}(r_i - R_i)$

Kriteria keputusan yang diambil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. Kemungkinan-kemungkinan yang Terjadi Pada Efek Alokasi**

KODE	KRITERIA	$a_{ij}$ (Efek Alokasi)	Komponen	
			( $E_{ij} - \hat{E}_{ij}$ )	( $r_i - R_i$ )
01	Competitive disadvantage, specialized	Negatif	Positif	Negatif
02	Competitive disadvantage, not specialized	Positif	Negatif	Negatif

Lanjutan Tabel 2...

KODE	KRITERIA	$a_{ij}$ (Efek Alokasi)	Komponen	
			( $E_{ij} - E_{ij}$ )	( $r_i - R_i$ )
03	Competitive advantage, not specialized	Negatif	Negatif	Positif
04	Competitive advantage, specialized	Positif	Positif	Positif

Sumber: Herzog, H.W. and R.J. Olsen tahun 1977.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah yang dilakukan dalam proses analisis Shift Share yaitu menghitung  $r_i$ ,  $R_i$ , dan  $R_a$ . Besaran nilai dari  $R_a$  merupakan besaran yang menunjukkan adanya pengaruh kebijakan regional terhadap perubahan tenaga kerja setiap sektor di tiap kabupaten, dan besaran nilai  $R_i$  menunjukkan pengaruh dari industri/sektor satu dengan yang lainnya terhadap perubahan pertumbuhan tenaga kerja pada sektor perekonomian di wilayah Propinsi Jawa Tengah, sedangkan besaran nilai  $r_i$  menunjukkan adanya pengaruh sektor perekonomian pada suatu wilayah satu dengan yang lainnya dalam regional yang sama dalam hal ini Propinsi Jawa Tengah. Kemudian nilai besaran komponen tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk pengaruh yang berasal dari: (a) komponen pertumbuhan nasional yaitu adanya perubahan tenaga kerja suatu wilayah akibat adanya perubahan kebijakan secara umum atau adanya perubahan kebijakan ekonomi nasional atau juga karena adanya perubahan hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah. (b) Komponen pertumbuhan Proporsional yang timbul akibat adanya perbedaan dalam kesediaan bahan baku/mentah, adanya perbedaan kebijakan industri serta adanya perbedaan keragaan dan struktur pasar, (c) Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah yang timbul akibat adanya perubahan tenaga kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini akan menimbulkan adanya suatu keunggulan daya saing wilayah pada sektor tertentu dibanding sektor yang sama pada wilayah lainnya. Daya saing ini akan baik manakala akses ke pasar relatif mudah, adanya dukungan kelembagaan

yang mantap dan kebijakan ekonomi wilayah bersangkutan kondusif dan adanya kelengkapan sarana dan prasarana sosial ekonomi di wilayah bersangkutan (Lucas dan Primm dalam Budiharsono, 1995).

Pengaruh komponen pertumbuhan proporsional terbesar diterima oleh Kotamadya Pekalongan, yaitu selama periode 1995 dan 1999 mengakibatkan adanya peningkatan tenaga kerja secara keseluruhan sebesar 38.683 orang. Dilihat dari sektornya ternyata sektor industri pengolahan terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 38.06 orang disusul sektor perdagangan meningkat sebesar 15.002 orang. Dengan demikian pertumbuhan tenaga kerja di Kodya Pekalongan termasuk dalam wilayah dengan pertumbuhan yang progresif. Sedangkan penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Kendal dengan penurunan tenaga kerja sebesar 633.947 orang, dengan sektor jasa yang mengalami penurunan sejumlah 404.741 orang kemudian disusul sektor industri pengolahan yaitu sebesar 226.079 orang. Dengan kata lain pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Kendal termasuk lamban.

Berdasarkan nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW<sub>ij</sub>) terlihat bahwa Kabupaten Blora mempunyai nilai PPW<sub>ij</sub> terbesar yaitu 57.818 yang berarti Kabupaten Blora pertumbuhan wilayahnya termasuk daerah yang mempunyai daya saing wilayah yang baik dalam hal tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten lain yang serupa dengan Kabupaten Blora adalah Kabupaten Purbalingga (34.184), Kabupaten Sragen (33.085), Kabupaten Rembang (14), Kabupaten Pati (13.096), Kabupaten Kudus (10.316), Kabupaten Jepara (43.377), Kabupaten Demak (8.913), Kabupaten Semarang (22.025), Kabupaten Temanggung (15.872), Kabupaten Pekalongan (14.284), Kabupaten Brebes (28.157), Kotamadya Magelang (3.666), Kotamadya Surakarta (24.218), Kotamadya Pekalongan (18.931), Kotamadya Semarang (11.189) dan Kotamadya Tegal (8.313). Sedangkan kabupaten lainnya selain yang disebutkan di atas termasuk pada wilayah yang tidak mempunyai daya saing wilayah (lihat pada nilai PPW<sub>ij</sub> yang bernilai negatif).

Dari nilai PP<sub>ij</sub>PN<sub>ij</sub> dan PPW<sub>ij</sub> di atas dapat dihitung dalam bentuk prosentase dari jumlah tenaga kerja masing-masing wilayah pada tahun 1995, sehingga didapatkan nilai seperti pada tabel 3.



**Tabel 3. Persentase Komponen Pertumbuhan Nasional, Pertumbuhan Proporsional dan Pertumbuhan Pangsanya Wilayah**

Nama Kabupaten	Perubahan Tenaga Kerja	Komponen pertumbuhan			
		PN <sub>ij</sub>	PP <sub>ij</sub>	PPW <sub>ij</sub>	PB <sub>ij</sub>
1. Cilacap	1.116	1.708	12.129	-12.721	-0.593
2. Banyumas	-50.883	1.708	-44.244	-8.348	-52.592
3. Plingga	-9.544	1.708	-21.940	10.687	-11.253
4. Bnegara	-21.005	1.708	-22.667	-0.047	-22.714
5. Kebumen	11.640	1.708	9.300	0.631	9.931
6. Purworejo	-2.607	1.708	4.187	-8.502	-4.316
7. Wonosobo	5.526	1.708	8.496	-4.678	3.817
8. Magelang	10.707	1.708	11.514	-2.516	8.999
9. Boyolali	-7.875	1.708	-7.214	-2.370	-9.584
10. Klaten	-11.852	1.708	-11.993	-1.568	-13.561
11. Sukoharjo	-4.814	1.708	-2.631	-3.891	-6.522
12. Wonogiri	-2.641	1.708	0.236	-4.585	-4.349
13. Kr. Anyar	-65.405	1.708	-61.219	-5.895	-67.114
14. Sragen	-19.983	1.708	-30.191	8.500	-21.691
15. Grobogan	5.701	1.708	5.240	-1.248	3.992
16. Blora	17.843	1.708	0.810	15.325	16.134
17. Rembang	-6.882	1.708	-8.595	0.005	-8.590
18. Pati	1.046	1.708	-3.166	2.504	-0.662
19. Kudus	44.665	1.708	39.684	3.273	42.956
20. Jepara	38.230	1.708	25.150	11.372	36.522
21. Demak	17.036	1.708	13.047	2.280	15.237
22. Semarang	26.324	1.708	19.282	5.334	24.615
23. Temanggung	-41.015	1.708	-47.769	5.046	-42.723
24. Kendal	-179.793	1.708	-173.634	-7.867	-181.501
25. Batang	15.715	1.708	15.557	-1.548	14.009
26. Pekalongan	31.587	1.708	25.322	4.556	29.878
27. Pemalang	17.854	1.708	16.446	-0.300	16.146
28. Tegal	18.584	1.708	22.437	-5.561	16.875
29. Brebes	11.764	1.708	6.254	3.801	10.056

Lanjutan Tabel 3 ....

Nama Kabupaten	Perubahan Tenaga Kerja	Komponen pertumbuhan			
		PN <sub>ij</sub>	PP <sub>ij</sub>	PPW <sub>ij</sub>	PB <sub>ij</sub>
30. Kod. Magel	21.037	1.708	11.186	7.574	19.329
31. Kod. SKA	-32.932	1.708	-46.577	11.937	-34.640
32. Kod. SMG	14.672	1.708	11.186	1.777	12.963
33. Kod. SLTG	20.893	1.708	17.206	1.979	19.184
34. Kod. PKL	45.242	1.708	29.229	14.304	43.534
35. Kod. Tegal	5.772	1.708	-3.072	7.139	4.067

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah selama periode 1995-1999 sebesar 1.708 persen. Pertumbuhan tenaga kerja ini ternyata di setiap kabupaten dan kotamadya di Propinsi Jawa Tengah tidak merata, ada kabupaten yang berada di bawah tingkat pertumbuhan propinsi tapi ada juga yang berada di atas tingkat pertumbuhan propinsi. Kabupaten dan kotamadya yang berada di atas tingkat pertumbuhan propinsi adalah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Batang, Pekalongan dan Kotamadya Tegal. Sedangkan kabupaten dan kotamadya yang berada di bawah pertumbuhan propinsi adalah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karang Anyar, Sragen, Rembang, Temanggung, Kendal dan Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar wilayah (kecuali Kabupaten Batang) yang berada di pesisir pantai Laut Jawa mengalami pertumbuhan yang berada di atas pertumbuhan tenaga kerja propinsi. Kabupaten yang paling rendah mengalami penurunan pertumbuhan tenaga kerja selama periode tahun 1995-1999 adalah Kabupaten Kendal yaitu sebesar 179.793 persen. Kejadian ini diduga akibat adanya pengaruh krisis ekonomi yang dialami selama periode tersebut, dengan pertimbangan karena di Kabupaten Kendal terdapat banyak pabrik yang berskala besar, sehingga dengan adanya krisis ekonomi tersebut banyak terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya.

Kelompok lima besar pertumbuhan tenaga kerja tertinggi selama periode tahun 1995-1999 di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.

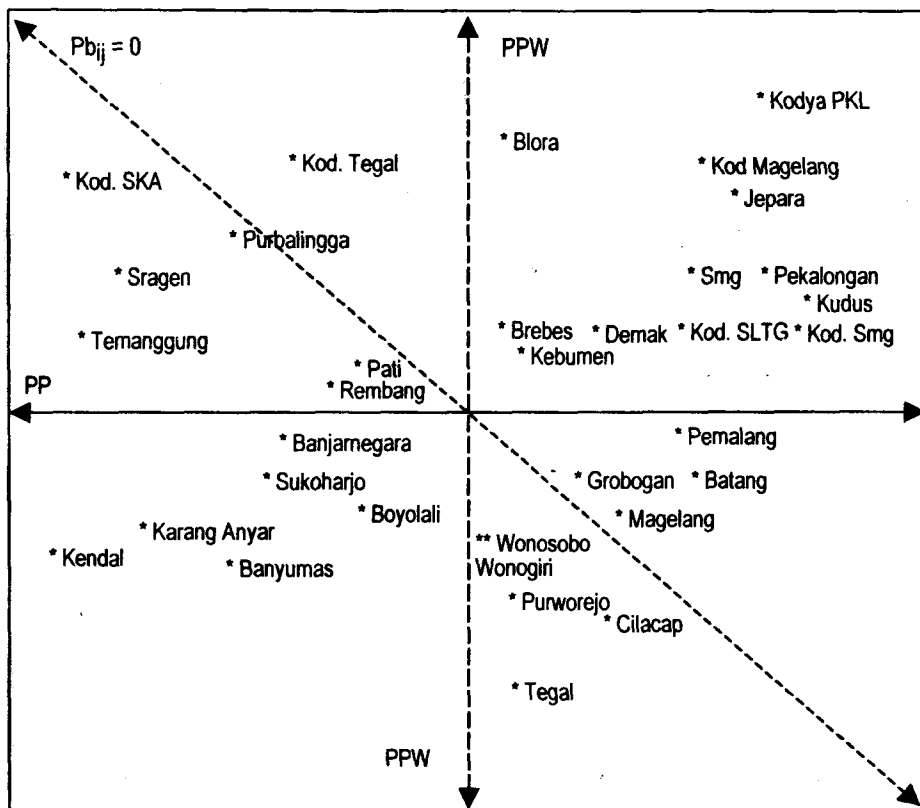
**Tabel 4. Kelompok Kabupaten yang Pertumbuhan Tenaganya Tertinggi Selama Periode 1995-1999 di Propinsi Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kodya	Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)
1	Kodya Pekalongan	15.242
2	Kabupaten Kudus	44.665
3	Kabupaten Jepara	38.230
4	Kabupaten Pekalongan	31.587
5	Kabupaten Semarang	26.324

Dari Gambar 1. terlihat bahwa kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam kuadran satu adalah Kabupaten Blora, Jepara, Semarang, Pekalongan, Kudus, Brebes, Demak, Kebumen, Kodya Magelang, Kodya Salatiga, Kodya Semarang, dan Kodya Pekalongan. Pada Kuadran I (satu) ini menunjukkan bahwa PP dan PPW bernilai positif. Dalam kondisi seperti ini berarti bahwa sektor-sektor di wilayah tersebut pertumbuhannya cepat ( $PP_{ij} \geq 0$ ) demikian juga dengan daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut apabila dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di wilayah lainnya ( $PPW_{ij} \geq 0$ ). Dari nilai PP dan PPW tersebut juga dapat menunjukkan nilai pergeseran bersih yang bernilai positif ( $PB_{ij} \geq 0$ ). Nilai pergeseran bersih positif ini berarti bahwa kabupaten-kabupaten tersebut merupakan wilayah kabupaten yang progresif.

Kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam Kuadran II (dua) adalah Kabupaten Pemasang, Grobogan, Batang, Magelang, Wonosobo, Wonogiri, Purworejo, Cilacap dan Kabupaten Tegal. Kuadran Dua ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang ada di kabupaten-kabupaten/Kodya-kodya tersebut pertumbuhannya cepat ( $PP_{ij} \geq 0$ ) akan tetapi daya saing wilayahnya untuk sektor-sektor tersebut jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di wilayah kabupaten lainnya tidak baik ( $PPW_{ij} < 0$ ).

**Gambar 1. Profil Pertumbuhan Tenaga Kerja Tiap Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Pada Tahun 1995-1999**



Meski daya saing wilayah untuk sektor-sektor di kabupaten yang berada pada Kuadran Dua tidak baik, namun demikian ada beberapa kabupaten yang nilai pergeseran bersihnya positif ( $P_{bij} \geq 0$ ) yaitu Kabupaten Grobogan, Pemasang, Batang dan Magelang.

Kabupaten-kabupaten yang berada pada Kuadran III (Tiga) adalah Kabupaten Banjarnegara, Boyolali, Karang Anyar, Kendal, Banyumas dan Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten yang berada di wilayah kabupaten tersebut pertumbuhannya lambat ( $PP_{ij} < 0$ ) dan daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut kurang baik jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Jawa Tengah ( $PPW_{ij} < 0$ ). Kondisi seperti ini juga menunjukkan bahwa semua kabupaten yang berada pada kuadran tiga ini nilai pergeseran

bersihnya adalah negatif ( $PB_{ij} < 0$ ) yang berarti bahwa kabupaten-kabupaten tersebut merupakan wilayah kabupaten yang lamban pertumbuhan tenaga kerjanya.

Pada Kuadran Empat (IV) menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi pada kabupaten-kabupaten yang ada pada kuadran ini pertumbuhannya lambat ( $PP_{ij} < 0$ ), akan tetapi daya saing wilayah untuk sektor-sektor ekonomi baik jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada kabupaten lainnya ( $PPW_{ij} \geq 0$ ). Kabupaten-kabupaten yang berada pada Kuadran Empat ini adalah Kabupaten Purbalingga, Sragen, Pati, Rembang, Temanggung, Purbalingga, Kodya Tegal dan Kodya Surakarta. Jika dilihat dari segi pergeseran bersihnya hanya Kotamadya Tegal yang mempunyai nilai pergeseran bersih positif ( $PB_{ij} \geq 0$ ). Dengan demikian Kotamadya Tegal berarti termasuk dalam wilayah yang pertumbuhannya progresif.

Pada gambar 1. juga dapat dilihat adanya garis yang memotong Kuadran II dan Kuadran IV melalui sumbu pangkal yang membentuk garis  $45^\circ$ . Garis itu merupakan garis yang menunjukkan besarnya  $PB_{ij}$  sama dengan nol ( $PB_{ij} = 0$ ). Dengan demikian bagian atas dari garis tersebut menunjukkan nilai positif ( $PB_{ij} \geq 0$ ) atau menunjukkan kabupaten-kabupaten yang progresif dan bagian bawah dari garis tersebut menunjukkan nilai  $PB_{ij}$  negatif ( $PB_{ij} < 0$ ) yang menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten tersebut termasuk pada wilayah yang lamban.

**Tabel 5. Analisis Shift Share Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 1995-1999 Tiap Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah**

Nama Kabupaten	Perubahan Tenaga Kerja	Komponen Perubahan Tenaga Kerja				
		$PN_{ij}$	$PP_{ij}$	Efek Kompetisi	Efek Alokasi	Kode
1. Cilacap	-56547.960	5226	1847	-59350.262	-4270.698	1
2. Banyumas	-6368.904	3524	1246	-14951.817	3812.913	2
3. Puring	16183.476	2210	781	14110.945	-918.469	3
4. Bnagara	31832.216	3123	1104	24527.443	3077.773	4
5. Kebumen	5169.936	4873	1723	-1099.296	-326.768	1
6. Purworejo	-11489.65	3172	1122	-12973.584	-2810.066	1
7. Wonosobo	19346.92	3549	1255	11096.645	3446.275	4

Lanjutan Tabel 5 ...

Nama Kabupaten	Perubahan Tenaga Kerja	Komponen Perubahan Tenaga Kerja				
		PN <sub>ij</sub>	PP <sub>ij</sub>	Efek Kompetisi	Efek Alokasi	Kode
8. Magelang	-10998.426	4283	1514	-15613.064	-1182.362	1
9. Boyolali	-5285	4128	1459	-8841.015	-2030.985	1
10. Klaten	-3375.024	2900	1025	-9958.224	2658.200	2
11. Sukoharjo	-6863.521	1432	506	-15664.331	6862.810	2
12. Wonogiri	-12086.454	5756	2035	-13831.801	-6045.653	1
13. Kr. Anyar	-11638.5	3214	1136	-15137.667	-850.833	1
14. Sragen	33269.115	3326	1176	24631.609	4135.506	4
15. Grobogan	2262.588	6312	2231	-4353.346	-1927.066	1
16. Blora	51246.04	4679	1654	26762.225	18150.815	4
17. Rembang	-18203.795	2780	983	-15518.696	-6448.099	1
18. Pati	658.125	5286	1869	-4750.345	-1746.530	1
19. Kudus	-6968.218	1192	421	-16769.931	8188.713	2
20. Jepara	1382.967	1948	689	-1814.781	560.748	2
21. Demak	23877.952	2870	1015	20116.188	-123.236	3
22. Semarang	18858.728	3317	1173	13217.014	1151.714	4
23. Temanggung	6634.076	3373	1192	1632.530	436.546	4
24. Kendal	-4283.792	2942	1040	-7579.915	-685.877	1
25. Batang	23899.852	2194	776	21133.912	-204.060	3
26. Pekalonga	26709.044	1515	536	37698.857	-13040.813	3
27. Pemalang	18254.818	3211	1135	15049.247	-1140.429	3
28. Tegal	-19006.768	2877	1017	-31327.301	8426.533	2
29. Brebes	30212.73	6064	2144	19862.456	2142.274	4
30. Kod. Magel	-584.15	32	11	-7096.582	6469.432	2
31. Kod. SKA	1740.468	11	4	238068.409	-236342.941	3
32. Kod. SMG	-209.94	22	8	-3324.367	3084.427	2
33. Kod SLTG	-8121.744	658	233	-57229.871	48217.127	2
34. Kod. PKL	4544.456	99	35	43617.109	-39206.653	3
35. Kod. Tegal	3528.048	182	64	15511.484	-12229.436	3
Jumlah	137579.709	102280	36159	209849.877	-210709.168	

Keterangan: 1 = Competitive disadvantage, specialized  
2 = Competitive disadvantage, not specialized  
3 = Competitive advantage, not specialized  
4 = Competitive advantage, specialized

Untuk melihat efek alokasi pada sektor pertanian digunakan analisis *shift share Esteban Marquillas* di mana dalam analisis ini diasumsikan bahwa struktur perekonomian tingkat propinsi sama dengan struktur perekonomian tingkat kabupaten atau nilai "Location Quotient" (LQ) sama dengan satu. Untuk melihat nilai efek alokasi sektor pertanian tiap kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.

Jumlah total kolom pada Tabel 5 menunjukkan karakter pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian di Propinsi Jawa Tengah periode antara tahun 1995 dan Tahun 1999. Tanda positif pada Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) menunjukkan bahwa rata-rata proporsi tenaga kerja sektor-sektor ekonomi di tingkat kabupaten sudah berada di atas pertumbuhan tenaga kerja tingkat propinsi. Nilai efek kompetisi positif mengindikasikan bahwa pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan tenaga kerja di sektor lainnya. Jumlah antara komponen efek kompetisi dengan komponen pertumbuhan proporsional menghasilkan nilai positif dalam shift bersih (pergeseran bersih). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian di Propinsi Jawa Tengah selama periode antara tahun 1995 dan 1999 mengalami peningkatan, atau rata-rata pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian tingkat kabupaten di Propinsi Jawa Tengah tumbuh lebih cepat dan share lebih tinggi daripada di tingkat propinsi.

Berdasarkan pada Tabel 5. ternyata tenaga kerja sektor pertanian yang mempunyai daya saing baik dan dapat dispesialisasikan terdapat di Kabupaten Brebes, Temanggung, Semarang, Blora, Sragen, Wonosobo, dan Kabupaten Banjarnegara. Jika dilihat dari ketujuh kabupaten tersebut merupakan wilayah-wilayah yang selama ini sudah dikenal sebagai penghasil produk pertanian yang menjadi andalan propinsi Jawa Tengah, seperti Kabupaten Brebes dengan hasil pertaniannya bawang merah dan bawang putih, kabupaten Temanggung dengan hasil produksi pertanian berupa padi/beras, dan Kabupaten Semarang dengan hasil produksi pertanian berupa klengkeng. Dengan melihat hasil tersebut, tenaga kerja sektor pertanian di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlu dikembangkan serta ditingkatkan keterampilannya, sehingga dapat ditingkatkan kesejahteraannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum sektor perekonomian yang mendominasi dalam menampung penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah selama periode tahun 1995 – 1999 adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa.
2. Secara umum sektor pertanian di propinsi Jawa Tengah selama periode tahun 1995 – 1999 pertumbuhan tenaga kerjanya positif yang berarti bahwa terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian tersebut tergolong progresif/maju (nilai PP-nya lebih besar 0). Sedangkan sektor pertanian yang mempunyai daya saing wilayah yang baik (nilai PPW-nya lebih besar sama dengan 0) terjadi di 16 kabupaten/ kotamadya yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Sragen, Blora, Demak, Semarang, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kotamadya Surakarta, Kotamadya Pekalongan dan Kotamadya Tegal. Sektor pertanian yang daya saing wilayahnya kurang baik terjadi di 19 kabupaten/ kotamadya lainnya.
3. Kabupaten-kabupaten/kotamadya yang mempunyai sektor perekonomian yang berdaya saing wilayah baik (nilai PPW-nya positif) dan pertumbuhan sektor perekonomiannya cepat (nilai PP-nya positif) adalah Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kotamadya Salatiga, Kotamadya Semarang, Kotamadya Magelang, dan Kotamadya Pekalongan. Kabupaten-kabupaten tersebut mempunyai nilai pergeseran bersih positif yang berarti bahwa kabupaten/ kotamadya tersebut tergolong wilayah kabupaten/ kotamadya yang progresif/ maju.
4. Akibat adanya pergeseran perubahan tenaga kerja di sektor perekonomian di Propinsi Jawa Tengah, efek alokasi tenaga kerja sektor pertanian yang bernilai positif terjadi di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Blora, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Tegal, Brebes, Kotamadya Semarang, dan Kotamadya Salatiga. Hal ini berarti



terjadi peningkatan pergeseran tenaga kerja dari sektor non pertanian ke sektor pertanian.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada bagian sebelumnya yang digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan permasalahan perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan khususnya yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebagai berikut:

1. Dengan adanya otonomi daerah yang telah diberlakukan mulai tahun 2001 maka kabupaten-kabupaten/kotamadya dalam mengembangkan potensi daerahnya terutama yang berkenaan dengan sektor perekonomian harus mempertimbangkan aspek penyediaan lapangan kerja. Untuk itu diperlukan skala prioritas sektor-sektor perekonomian mana saja yang memberikan peluang peningkatan lapangan kerja perlu mendapatkan prioritas utama.
2. Di dalam melakukan pengembangan suatu sektor perekonomian di setiap daerah kabupaten/kotamadya hendaknya pertimbangan utamanya didasarkan pada sektor-sektor yang mempunyai daya saing wilayah terbaik yang dikembangkan tanpa mengabaikan sektor pendukungnya. Pengembangan yang dilakukan secara *integrated*/lintas sektoral dan dilakukan secara konsisten dan istiqomah.
3. Untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai sektor-sektor yang lebih terperinci lagi khususnya sektor yang diduga bisa membuka lapangan kerja baru untuk menampung angkatan kerja yang semakin meningkat, sehingga informasi yang didapatkan itu bisa lebih komplit dan komprehensif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimus, 1999. *Jawa Tengah dalam Angka*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- Budiharsono, 1995. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Belum dipublikasikan.

- Herzog, H.W. and Olsen, R. 1977. *Shift-Share Analysis Revisited: The Allocation Effect and the Stability of Regional Structure*. Tennessee: OAK Ridge National Laboratory.
- Hulu, E. 1988. *Beberapa Metode Non-Survey Estimasi Koefisien I-O*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekartawi, 1996. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. dan Irawan. 1995. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Winoto, J., 1996. *Transformasi Struktur Perekonomian dan Ketenagakerjaan Nasional (Tinjauan Teoritis dan Aplikasinya terhadap Transformasi Perekonomian dan Ketenagakerjaan Nasional yang telah Terjadi dan Proyeksinya sampai dengan Akhir PJP II)*. Bogor: Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Program Pascasarjana IPB.